

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG

Zaizil Ihza Mahendra *
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H**

Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai pengguna narkoba, yang juga memandang anak sebagai korban sekaligus pelaku, sehingga prioritas diberikan pada upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi, bukan hanya pemidanaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Sabang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak pengguna narkoba menggunakan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan tindakan dan rehabilitasi, bukan hanya pidana, dengan sanksi maksimal setengah dari pidana dewasa. Anak dianggap sebagai pelaku sekaligus korban, sehingga selain sanksi pidana, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi dan pembimbingan untuk memulihkan anak dan mencegahnya kembali menyalahgunakan narkoba, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika maka lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN INVOLVED IN DRUG ABUSE CRIMINAL ACTS IN THE JURISDICTION OF SABANG CITY

Zaizil Ihza Mahendra *
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H**

Legal protection for drug users, according to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, is provided through medical and social rehabilitation for addicts and victims of abuse. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection provides special protection for children as drug users, which also views children as both victims and perpetrators. Therefore, priority is given to supervision, treatment, and rehabilitation, rather than just criminalization. The problem in this thesis is how the legal regulation of drug abuse crimes by children in Indonesia, how legal accountability for children involved in drug abuse crimes is enforced, and how legal protection for children involved in drug abuse crimes is provided in the jurisdiction of Sabang City.

This research is normative and empirical, that is, research that uses laws and regulations as the basis for solving the problems presented. The data used are primary and secondary, and the data collection methods employed are library research and field research.

Legal provisions for children in conflict with the law are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Legal accountability for children who use narcotics uses a juvenile criminal justice system that prioritizes action and rehabilitation, not just criminal penalties, with a maximum penalty of half the adult penalty. Children are considered both perpetrators and victims, so that in addition to criminal sanctions, judges can also impose rehabilitation and guidance measures to restore children and prevent them from abusing drugs again, in accordance with the Narcotics Law and the Child Protection Law. Legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes, if the child is a perpetrator of narcotics abuse, prioritizes the granting of rehabilitation rights over prison sentences.

Based on research findings, it is understood that the police's obstacle in enforcing the law against children involved in drug abuse is a lack of public awareness of their role in preventing and eradicating drug abuse by children..

Keywords: Legal protection, Children, Narcotics.

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and II of Law Program, Islamic University of North Sumatra*